

Dinamika Politik Elektoral: *Hate Speech* Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017

Agung Wiraguna Subagio*

Abstrak

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 aktivitas *hatespeech* (ujaran kebencian) meningkat dibanding Pilkada-pilkada sebelumnya. Studi ini akan membahas dinamika politik Pilkada Jakarta, dimana *hatespeech* menjadi isu yang dihadapkan pada pasangan petahana yang mencalonkan seorang calon Gubernur dengan latar belakang minoritas. Persoalan politik *hatespeech* dalam dinamika politik elektoral akan mempengaruhi opini publik yang nantinya menuju pada seleksi kandidat oleh masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumen, serta wawancara mendalam dengan tim pemenangan Ahok-Djarot dan peneliti dari LIPI. Hasil penelitian menunjukkan *hatespeech* yang ditujukan kepada pasangan petahana berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pilkada DKI Jakarta 2017 meskipun diawal pemilihan pasangan petahana memiliki modal elektabilitas dan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Fenomena di Jakarta ini mirip dengan fenomena *Bradleyeffect*. Peneliti juga menemukan bahwa *hatespeech* menjadi semakin berkembang di Jakarta dan membuat Jakarta menjadi terpolarisasi serta semakin berpengaruhnya mobilisasi kelompok islam garis keras dalam Pilkada.

Kata Kunci: Pilkada, *Hate Speech*, politik elektoral

Abstract

In the elections of DKI Jakarta 2017 hatespeech activities (hate speech) increased compared to previous elections pilkada. This study will discuss the political dynamics of Pilkada Jakarta, where hatespeech is an issue faced by a petahana partner nominating a candidate for governor with a minority background. The political issues of hatespeech in the dynamics of electoral politics will affect public opinion which will lead to the selection of candidates by the public. Research data obtained through observation, document, and in-depth interviews with Ahok-Djarot volunteers and researchers from LIPI. The results showed that hatespeech directed to the petahana pairs affect the vote in the elections of Jakarta Capital City in 2017, although at the beginning of the election petahana pair has elektabilitas capital and high levels of job satisfaction. The phenomenon in Jakarta is similar to the Bradley effect phenomenon. Researchers have also found that hatespeech is growing in Jakarta and making Jakarta polarized and increasingly influential in the mobilization of Islamist groups in elections.

Keywords: Pilkada, Hate Speech, electoral politics

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
agungwiragunas@gmail.com

Pendahuluan

Belakangan ini isu-isu *hate speech* sedang marak digunakan dalam politik. Tidak hanya di Indonesia saja namun juga di mancanegara. Salah satu contoh *hate speech* dalam politik adalah bagaimana Donald Trump dapat memenangkan pemilu di Amerika dengan cara menyerang kelompok-kelompok minoritas di Amerika yang salah satunya adalah umat Islam. Bahaya dari *hate speech* ini tentunya sangat berdampak luas karena tidak hanya berdampak pada kelompok identitas namun juga kepada keberlangsungan demokrasi. Sehingga dapat kita katakan bahwa ujaran kebencian dapat menyebabkan diskriminasi dan tindak kekerasan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Tren yang digunakan saat ini adalah ujaran kebencian dipergunakan untuk menciptakan permusuhan dan mendiskreditkan suatu kelompok tertentu untuk dapat memobilisasi ataupun merekrut kelompok-kelompok demi kepentingan politik. Bahkan Amnesty Internasional telah mengeluarkan hasil laporan tahunannya tentang situasi HAM di dunia yang hasilnya tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun dengan penuh isu kebencian.

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena yang baru di Indonesia karena seorang pasangan petahana yang mendapatkan elektabilitas dan tingkat kepuasan mencapai 70% dapat dikalahkan dalam pilkada. Padahal sebelumnya di banyak pilkada lainnya di Indonesia seorang calon petahana dengan modal elektabilitas serta tingkat kepuasan kerja mencapai 70% sudah dapat dipastikan akan memenangkan pemilihan tersebut. Salah satu penyebab yang paling besar adalah banyaknya terjadi *hatespeech* yang menyerang setiap pasangan kandidat. Namun salah satu kandidat yaitu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dapat dikatakan lebih tersudutkan karena Basuki atau lebih dikenal Ahok ini memiliki latar belakang minoritas dari segi agama dan ras di Jakarta. Sehingga ketika menghadapi isu *HateSpeech* pilkada ini tidak memberikan hak yang sama bagi tiap kandidat dalam menghadapi isu tersebut.

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat tiga pasang kandidat yang bersaing, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menjadi pasangan nomor urut satu dan didukung oleh partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB. Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendapatkan nomor urut dua, pasangan ini didukung oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Terakhir adalah pasangan nomor urut tiga yaitu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang

dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PKS. Peneliti disini akan berfokus pada bahasan *hatespeech* yang ditujukan kepada pasangan dengan nomor urut dua.

Dalam jurnal yang dikeluarkan jurnal.kominfo.go.id, *hatespeech* didefinisikan sebagai bagian dari marginalisasi dan prasangka yang menjadikan seseorang atau tergabung dalam komunitas menjadi buruk. Yang dikategorikan marginalisasi disini yaitu, eufimisme (penghalusan makna), disfemisme (pengasaran bahasa), labeling serta Stereotipe. Intimidasi, ejekan, julukan dan de-humanisasi merupakan bagian dari prasangka karena dalam hal tersebut merepresentasi suatu hal dengan membentuk konotasi yang negatif dan bersifat subjektif (Juditha, 2017). Nantinya *Hatespeech* tersebut akan digunakan untuk membentuk opini publik. Opini publik sendiri merupakan hubungan antara persepsi, pendirian, dan opini. Faktor-faktor yang membentuk persepsi sendiri adalah latar belakang budaya, pengalaman dimasa lalu, nilai yang dianut dan berita-berita yang berkembang akan berdampak menjadi opini dari para individu (Kasali, 2003). Ketika opini tersebut sudah bercampur dari berbagai opini lain maka akan menjadi opini publik. Menurut Nimmo (Nimmo, 2000), opini publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, terdapat isi, arah, dan intensitas. Opini publik dan juga propaganda mempunyai hubungan yang dapat dikatakan erat dan tidak bisa dipisahkan. Propaganda sendiri semata-mata bersifat sebagai alat pengontrol bagi opini publik. Propaganda dilakukan untuk mempengaruhi atau mengontrol opini publik yang akan menjadi target dari propaganda. Pada tujuan akhirnya akan mempengaruhi masyarakat dalam menyeleksi kandidat calon Gubernur.

Menurut Timothy, seleksi kepemimpinan politik diperlukan agar dapat mengetahui sejauh mana calon dapat dipercaya sebagai instrumen untuk menciptakan kebijakan publik. Kedua, kejujuran, integritas dan kompetensinya. Komunikasi pemasaran politik didalam seleksi kepemimpinan politik telah menjadi cara yang efektif untuk menangkap dan mempertahankan perhatian dari masyarakat yang akan memilih. Hal ini mempengaruhi preferensi pemilih didalam sebuah pemilihan umum melalui pembangunan gagasan sebagai kunci dari sebuah produk politik untuk ditawarkan kepada masyarakat yang akan memilih. (Ahmad, Gumelar, & Mukhroman, 2017). Czudnowski dalam Riswanda Imawan, mengemukakan tujuh variabel yang menentukan seseorang terpilih atau tidak terpilih dalam suatu pemilihan yaitu, *Social Background, Political Socialization, Initial Political Activity, Apprenticeship, Occupational Variables, Motivations, Selection*. (Imawan, 1998)

Pada Pilkada DKI 2017 Politik Identitas dipergunakan sebagai bagian komoditas politik. Keragaman etnis dengan berbagai karakter yang berbeda-beda tentunya menjadi pengaruh dalam menentukan persepsi untuk melihat suatu permasalahan. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius, apalagi ketika isu-isu identitas ini dipolitisasi dengan tujuan menyamakan persepsi atau mengkotakkan setiap etnis. Karena Indonesia adalah negara dengan beragam dari etnis dan budayanya, jika *hatespeech* dengan menggunakan isu-isu politik identitas digunakan akan berbahaya dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas bagaimana dinamika politik elektoral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan mengapa isu-isu *Hatespeech* muncul dalam Pilkada Jakarta serta implikasinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni di tahun 2014 yang berjudul tentang Perilaku pemilih (Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Jokowi-Basuki pada pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012). Fokus pada penelitian tersebut adalah banyaknya isu SARA yang dimainkan di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang menyudutkan pasangan Jokowi-Basuki dalam Pilkada tersebut. Disini pasangan incumbent kalah dari pasangan baru yang dihadapkan pada isu-isu SARA yang menerpanya. Penelitian ini melihat perilaku pemilih dari segi pendekatan rasional, atau kelebihan dan kekurangan dari kinerja pada periode sebelumnya.

Selanjutnya ada penelitian dari Fikri Adrian tahun 2013 yang mengangkat judul mengenai Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012” . Studi ini melihat bagaimana elit menggunakan identitas untuk kepentingan politik, sehingga identitas etnis yang terbentuk bukanlah bersifat alami karena dibentuk berdasarkan sumber politik untuk kepentingan individu dan kelompok.

Dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017

Pasangan Ahok-Djarot sempat unggul dalam putaran pertama, akan tetapi perolehan suaranya belum mencapai angka 50% +1 suara agar dapat menang dalam satu putaran. Ahok dan Djarot berhasil unggul dengan memenangkan suara di 6 dapil dengan total suara 42,99 persen suara. Disusul oleh Anies dan Sandiaga yang memenangkan 4 dapil dengan perolehan

39,93 persen suara sedangkan pasangan Agus dan Sylvi gagal unggul pada semua dapil dengan perolehan hanya 17,06 persen suara (Fardiansyah, Achmad, 2017). Dari hasil ini maka akan dilanjutkan dengan dua putaran yang calonnya adalah peserta pasangan calon nomor urut dua dan tiga. Sebelum putaran pertama dimulai, elektabilitas dari pasangan nomor urut dua sangat tinggi, sehingga prediksi memenangkan dalam satu putaran sangat kuat. Akan tetapi, elektabilitas pasangan Ahok dan Djarot mulai terkikis secara perlahan.

“Harus dilihat dukungan partai legislatif kepada Ahok dan Djarot ada berapa. Jika sebuah partai sudah kuat dalam basis legislatif namun kinerja di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan berpengaruh. Selain itu harus dilihat dinamika politiknya, karena variabel di Pilkada Jakarta dramatis. Ahok dan Djarot memiliki elektabilitas serta kepuasan kerja yang tinggi, namun ada faktor lain untuk menentukan suara seperti agama atau politik identitas serta faktor personal dari kandidat tersebut dan juga kebijakan yang diambil berdampak pada masyarakat seperti apa.” (Ridho, peneliti dari LIPI).

Dalam putaran kedua pasangan Anies dan Sandiaga berhasil meraih suara terbanyak dengan persentase mencapai 57,95 persen dengan jumlah suara 3.240.332 suara. Sedangkan pasangan Ahok dan Djarot hanya mendapat 2.351.245 suara atau sekitar 42,05 persen dari total suara sah sebanyak 5.591.577 suara. Ahok dan Djarot gagal untuk mempertahankan suaranya, pada putaran kedua ia hanya berhasil unggul di dapil 3 yaitu sebagian dari Jakarta Utara. Suara tambahan yang didapatkan Anies dan Sandi banyak berasal dari limpahan suara pendukung dari pasangan Agus-Sylvi pada putaran sebelumnya. Sedangkan suara yang diperoleh Ahok dan Djarot cenderung stabil dengan putaran pertama.

Jumlah suara yang didapatkan Ahok dan Djarot di Kepulauan Seribu sebanyak 5.391 suara atau sekitar 38%. Pasangan Anies dan Sandiaga memperoleh suara sebanyak 8.796 suara atau sekitar 62% dengan total suara sah 14.187. Pada daerah Jakarta utara, Ahok dan Djarot berhasil mendapat 418.068 suara atau sekitar 47%. Di sisi lain pasangan Anies dan Sandiaga mendapat suara 466.340 suara atau sebanyak 52% dengan total suara sah 884.408. Di Jakarta pusat Ahok dan Djarot mendapat suara sebanyak 243.416 suara dengan persentase 42% sedangkan Anies dan Sandiaga mendapat 333.042 suara atau sebanyak 57% dari total suara sah 576.449 suara. Di Jakarta barat, Ahok dan Djarot mendapat suara sebanyak 611.759 suara atau sekitar 47%. Anies dan Sandiaga mendapat 684.980 atau sebanyak 52% dari total 1.296.739

suara sah. Di Jakarta Timur, Ahok dan Djarot memperoleh suara 612.093 atau sebanyak 38%, Anies dan Sandiaga memperoleh 993.174 suara dengan persentase 61% dari total suara sah 1.605.266. Di daerah Jakarta Selatan, Ahok dan Djarot memperoleh 459.639 suara, sedangkan Anies-Sandiaga memperoleh 754.665 suara dengan total suara sah mencapai 1.214.304 (Sari, Nursita, 2014).

“Dari sini dapat dilihat bahwa limpahan suara pasangan AHY-Sylvi sangat berpengaruh besar terhadap hasil perolehan suara. Frame ini harus dilihat dari kerangka besar dalam demokrasi, konsolidasi dari parta-partai sera dinamikanya seperti apa. Jadi pola-pola ini sangat menentukan apalagi ketika dibumbui isu-isu politik identitas” (Ridho, peneliti dari LIPI).

Munculnya Isu-Isu Hatespeech Pada Pasangan Basuki dan Djarot

Banyaknya *hatespeech* di pilkada ini menjadi kemunduran dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Karena Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika memiliki beragam kebudayaan, suku dan agama yang membuat potensi perpecahan karena perbedaan ini sangat besar. Banyaknya isu politik identitas ini juga menjadi salah satu alat ukur dari suksesnya acara demokrasi tersebut. Karena dari cara berkampanye yang baik dapat menentukan bagaimana situasi dalam pilkada tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya *Hatespeech* terhadap pasangan Ahok dan Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu, elektabilitas serta tingkat kepuasan kinerja Ahok dan Djarot yang sangat tinggi membuat lawan-lawan politiknya harus lebih inovatif untuk menurunkan angka survei tersebut. Kedua, selama masa kepemimpinannya Ahok membuat beberapa kebijakan yang cenderung dianggap merugikan masyarakat kelas bawah sehingga dianggap kebijakannya tidak populis. Ketiga, Ahok memiliki latar belakang minoritas sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ahok merupakan seorang non-muslim dan keturunan dari etnis tionghoa sedangkan mayoritas masyarakat Jakarta beragama Islam dengan etnis Betawi.

Ada beberapa isu-isu *hatepeech* yang diarahkan kepada pasangan Ahok dan Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertama, isu etnis dan SARA yang ebanarnya sudah dimulai dari sejak Ahok menggantikan Jokowi yang pada saat itu menjadi Gubernur di Jakarta. Dengan latar belakang Ahok yang seorang minoritas di Jakarta, serignkali ia bersinggungan dengan

kelompok islam yang memprotesnya menjadi pemimpin. Selain itu sikap Ahok yang terkenal Arogan membuat banyak memiliki musuh di Jakarta.

“sentimen agama menjadi isu yang paling sering didengar dalam pilkada Jakarta 2017, dapat dilihat dari aksi-aksi yang berjilid-jilid yang dapat mempengaruhi dinamika politik di Jakarta. Mengapa ketika masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Ahok namun tidak memiliha. Banyak persoalan agama yang dimainkan, seperti larangan mensholatkan jenazah, pernyataan pengkafiran dan lainnya. persoalan “isu minoritas” seringkali digulir. Dari hal tersebut faktor kinerja saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa ada pertentangan antara kinerja bagus dengan keterpilihan”(Ridho, peneliti dari LIPI)

Dalam putaran kedua, masalah-masalah politik identitas semakin marak digunakan. Terdapat beberapa kasus yang menyudutkan pasangan Ahok dan Djarot seperti beberapa kali terdapat upaya untuk menempelkan stiker bertuliskan pibumi pada kendaraan-kendaraan dan dipinggir jalan di Jakarta. Indonesia yang memiliki semboyan tentang kebhinnekaan telah dipersempit maknanya menjadi salah satu kelompok saja. Hal ini menjadi kemunduran tersendiri dari cara berfikir masyarakat tentang toleransi dimana mereka dapat bebas untuk mendiskriminasi kelompok lainnya. Perebutan kekuasaan tertinggi di Jakarta yang seharusnya menghadirkan kontestasi untuk membangun Jakarta telah bergeser maknanya menjadi kontes yang mengatasnamakan agama apa dan etnis darimana yang boleh memimpin Jakarta.

Kedua, terjadi intimidasi terhadap pendukung Ahok yang beragama Islam. Karena di beberapa masjid di Jakarta terpasang spandung pelarangan untuk mensholatkan jenazah untuk pendukung penista agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Ahok. Selain itu terdapat juga spanduk yang mengatakan bahwa “Penista Al-Quran, Perusak Persatuan Bangsa”(Rizqo, Kanavino Ahmad;, 2017).

Ketiga, banyaknya aksi-aksi yang mempermasalahkan tentang pernyataan Ahok yang dianggap telah menistakan agama Islam karena Ia mengutip sebuah ayat Al-Quran. Hal ini dipicu setelah Ahok membahas ayat Al-quran dalam pidatonya. Meskipun pada awalnya pidato Ahok tidak dipermasalahkan, namun pada tanggal 6 Oktober Buni Yani mengupload pidato Ahok tersebut dalam akun *facebooknya* dengan judul “penistaan terhadap agama?”. Yang menjadi masalah ialah pada transkrip pidato tersebut Buni Yani menghilangkan kata “pakai” didalamnya, setelah itu banyak pergerakan untuk menjatuhkan Ahok. Bahkan FPI dan MUI

mempolisikan Ahok yang diikuti dengan aksi-aksi damai yang berjilid-jilid. Dengan adanya aksi-aksi ini tentu elektabilitas Ahok terganggu secara elektoral apalagi jika Ahok secara hukum dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka.

Keempat, persekusi yang diterima Ahok dan pendukungnya. Ahok diancam dibunuh oleh seorang pria yang mengaku sebagai sesepuh di daerah Rawa Belong. Bahkan ia dengan lantang akan membayar siapapun yang berhasil membunuh Ahok dengan hadiah sebesar satu miliar rupiah (Pria yang Janjikan Rp 1 Miliar Untuk Bunuh Ahok Akhirnya Dipolisikan, 2016). Ahok juga mendapatkan ancaman untuk digantung, hal ini terlihat dari adanya spanduk bertuliskan "Gantung Ahok Disini" terpampang dengan jelas dalam aksi damai yang dilakukan untuk menuntut penahanan Ahok dengan kasus penistaan agama. Bahkan hal ini juga ditiru oleh anak-anak yang melakukan pawai, dalam pawainya anak-anak tersebut menyanyikan lagu yang mengandung unsur kekerasan. Anak-anak tersebut meneriakkan "bunuh-bunuh si Ahok" terdengar didalam video pendek yang tersebar di media sosial (Yuliawati, 2017).

Kelima, banyaknya hoax yang diarahkan kepada Ahok seperti tersebarnya foto Ahok sedang dicium oleh dua orang wanita dan terbukti foto editan, ada juga foto Ahok dengan Kapolri Tito Kanavian beserta botol Equil yang dianggap miras, selain itu ada juga anggapan skenario Ahok untuk mengusir pribumi yang terbitkan dalam media online intelijen. Dalam media tersebut pernyataan Ahok yang meminta masyarakat Jakarta untuk menjual rumahnya saja jika mendapat pajak PBB yang dianggap mahal, hal ini dianggap sebagai sebuah pengusiran dari Ahok terhadap masyarakat asli di Jakarta. Beredar juga foto yang menganggap pendukung Ahok merobek Al-Quran ketika sedang berlangsungnya sidang Ahok terhadap tuduhan penistaan agama, padahal foto tersebut diambil pada waktu dan tempat serta alasan yang berbeda.

“Dalam setiap survei diawal pilkada Jakarta 2017 Ahok memenangkan setiap survei tersebut, namun diakhir-akhir Ahok diserang oleh tiga isu yaitu ayat, mayat dan reklamasi. Padahal isu tersebut dapat dilihat dengan cara yang berbeda. Makannya suara Anies dapat naik dan suara Ahok stabil. Karena Ahok bukan hanya menjadi pemimpin namun juga menjadi pengaruh. Kesalahan Ahok hanya karena membahas Almaidah. Kekalahan Ahok karena perbedaan agama dan intimidasi terhadap pendukungnya”. (Venno, tim pemenangan Ahok-Djarot)

Implikasi Hate Speech Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Hasil dari banyaknya *hatespeech* dengan isu-isu politik identitas dan primordialisme yang bergulir di pilkada DKI Jakarta 2017 akan membuat isu-isu senda akan semakin berkembang dan tidak menutup kemungkinan untuk dimainkan kembali di pemilu-pemilu selanjutnya. Karena dengan cara ini terbukti dapat menjatuhkan seorang calon petahana yang memiliki modal sangat kuat untuk kembali terpilih di pemilihan selanjutnya. Kebebasan untuk berpendapat dalam berdemokrasi malah menjadi penghambat dalam kemajuan demokrasi Indonesia. Bawaslu sendiri sebagai pengawas tidak dapat berbuat banyak, karena para pelaku ujaran kebencian ini tidak terdaftar sebagai bagian dari *circle* partai tersebut. Sehingga sulit untuk diidentifikasi dan diberi tindakan oleh bawaslu. Padahal Indonesia sendiri telah memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang masalah *hatespeech* seperti UU ITE dan diskriminasi etnis meskipun dalam penegakkannya masih belum dapat dikatakan adil dan tegas.

Selain itu Jakarta menjadi lebih semakin terpolarisasi. Jakarta terkotak-kotakan akibat bergulirnya kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok. Masyarakat Jakarta berhasil dipancing sentiment primordialnya, terlebih lagi Jakarta yang berasal dari beragam kebudayaan cukup besar potensi mengembangkan rasa intoleransi terhadap kaum minoritas di Jakarta. Dibanyak hal, Jakarta menjadi tempat yang semakin lebih terpolarisasi karena tuduhan penghujatan Ahok, dengan berbagai pendapat yang terbagi tentang apakah seorang non-Muslim dapat memimpin masyarakat yang berpenduduk mayoritas Muslim. Hal ini merupakan salah satu tingkat kesuksesan dari strategi lawan ahok sekaligus menjadi dampak buruk dari kampanye yang bertujuan untuk memecah suara pendukung Ahok. Apalagi umat muslim dihadapkan dengan pilihan jika mendukung Ahok maka akan melanggar prinsip Islam.

Dapat dibilang fenomena pada pilkada DKI Jakarta ini mirip dengan apa yang terjadi pada *Bradlyeffect* yang merupakan persoalan para kandidat minoritas atau non-kulit putih pada pemilu Amerika Serikat. Dalam *Bradley Effect* kandidat petahana non kulit putih unggul dalam setiap survey yang dilakukan namun ketika dihadapkan dengan pemilu yang sesungguhnya ia kalah. Hal ini karena masyarakat Amerika dianggap belum siap untuk dipimpin oleh kaum minoritas. Hal ini sama seperti ahok yang dalam setiap survey selalu mendapat peringkat tertinggi bahkan elektabilitas serta tingkat kepuasannya tinggi, namun ia kalah dalam pemilu sebenarnya. Hal ini dapat disamakan karena masyarakat yang mayoritas muslim belum siap

untuk dipimpin oleh seseorang yang non-muslim. Padahal dapat dibayangkan Jakarta merupakan kota yang rasional, karena masyarakat di Jakarta mayoritas terdidik dan kritis. Penduduk Jakarta 45-50% berpendidikan SLTA dan 20-25% meraih perguruan tinggi. Dibandingkan daerah lain Jakarta jauh lebih baik. Sarana untuk meraih informasi di Jakarta juga jauh lebih mudah dibandingkan rata-rata daerah lain. Jadi rasionalitas seharusnya membuat pemilih Jakarta menjadi kritis dan tidak cenderung memilih dengan alasan identitas. Di banyak survey juga menyebutkan bahwa faktor etnis dan agama tidak banyak berpengaruh dalam pilkada DKI Jakarta.

Pada pilkada DKI Jakarta 2017 ini muncul fenomena dimana kelompok Islam yang beraliran keras dan frontal dapat menarik suara lebih banyak dibandingkan kelompok Islam moderat yang bermain ditengah-tengah. Gerakan yang dilakukan kelompok ini dapat menarik simpatisan dari masyarakat dan berdampak lebih luas. Kelompok Islam sebenarnya boleh saja berpartisipasi di perpolitikan Indonesia. Tapi Isu yang dibawa harus lebih disaring kembali karena sebagai Agama mayoritas suara dari umat Islam sangat berdampak di Indonesia termasuk dalam dinamika politik di Indonesia. Idealnya Umat Islam di Indonesia tidak selalu mengincar politik kekuasaan saja namun juga dapat diikuti dengan politik kebangsaan untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Pergerakan yang menjadi masalah adalah ketika mencoba memobilisasi dengan cara berkhotbah dari masjid ke masjid lain namun dengan membawa isu yang dibumbui dengan politik identitas. Karena mereka dalam khotbahnya memiliki tujuan tersendiri untuk berpolitik. Karena dianggap alim dan taat beragama akhirnya kelompok ini bisa masuk dan berkhotbah dengan membawa tujuan kepentingan politik didalamnya.

Kesimpulan

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017 tingginya presensi kemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat membuat lawannya menggunakan cara-cara non-konvensional. Dengan memanfaatkan isu-isu tentang politik identitas perolehan suara dari pasangan Ahok dan Djarot perlahan turun meskipun di awal elektabilitas pasangan ini terbilang cukup tinggi. Meskipun setiap pendukung pasangan calon saling menggulirkan *hatespeech* tetapi

pilkada Jakarta 2017 tidak menghadirkan keseimbangan karena salah satu pasangan calon berasal dari ras dan agama minoritas dihadapkan pada isu-isu politik identitas.

Terdapat marginalisasi dan prasangka yang menuju pada *hatespeech* atau ujaran kebencian di pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini membentuk opini publik untuk menentukan siapa pasangan kandidat yang akan dipilih. Maraknya ujaran kebencian yang bergulir di pilkada DKI Jakarta 2017 menggambarkan bahwa masih banyak kekurangan dalam demokrasi di Indonesia. Meskipun benar dikatakan jika demokrasi Indonesia masih *on the track* namun belum dapat dikatakan sempurna. *Freedom of speech* yang menjadi daya jual demokrasi untuk mengekspresikan diri dalam berpendapat dimanfaatkan menjadi *freedom of hate* dimana masyarakat saling mengeluarkan ujaran kebencian demi memobilisasi dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Masyarakat Indonesia menjadi mudah terbawa perasaan dan sensitif dalam menerima kritik dan opini yang ditujukan kepadanya. Tidak heran jika banyak pelaporan atas ujaran kebencian dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini di Indonesia. Kepentingan demi meraih suara yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan segala cara termasuk menggunakan isu-isu politik identitas untuk memobilisasi suara masyarakat akan mengakibatkan ancaman di kemudian hari. Dampak dari masalah politik identitas ini dapat mentrigger isu SARA, gender, primordialisme atau juga afiliasi politik yang berdampak kepada mundurnya demokrasi dan juga rasa toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Isu politik identitas yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berpengaruh terhadap dinamika pilkada di Jakarta. Apalagi salah satu kandidat berlatar belakang berbeda dari mayoritas masyarakat di Jakarta. Hal ini akan membuat isu-isu ujaran kebencian ini semakin berkembang dan pemilu di Indonesia kehilangan substansinya. Pesta demokrasi di Indonesia dirusak oleh banyaknya *black campaign* yang menyudutkan identitas tertentu. Jakarta menjadi terbagi antara Jakarta yang Islam dan pluralis. Isu-isu tentang intoleran yang terus digunakan membuat Pilkada Jakarta menjadi cukup menegangkan dan menimbulkan rasa kekhawatiran serta ketidaknyamanan. Karena isu intoleran ini nantinya berdampak bukan hanya di Jakarta namun juga memungkinkan terjadi di daerah lain. Tentunya pemilu yang substantif akansangat diperlukan didalam Pilkada DKI Jakarta kedepannya. Terlebih lagi sebagai Ibu Kota negara, Jakarta sangat strategis dalam berbagai macam hal. Masyarakat harus lebih berfokus untuk

melihat program apa yang akan ditawarkan bukan melihat dari figur siapa yang akan maju sebagai kandidat.

Daftar Pustaka

Ahmad, I., Gumelar, R. G., & Mukhroman, I. (2017). *Komunikasi pemasaran politik dan pengaruhnya terhadap seleksi calon pemimpin pada partai politik (survei penelitian PDIP kab.Pandeglang-Lebak Provinsi Banten).*

Fardiansyah, Achmad. (24 Januari 2017). *Ini Hasil Pilgub DKI Putaran Pertama.* Diambil dari news.okezone.com.(diakses 12 September 2017)

Imawan, R. (1998). *Membedah Politik Orde Baru.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Juditha, C. (2017). *HATESPEECH di MEDIA ONLINE: KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017,* 137-149.

Kasali, R. (2003). *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Pustaka Utama Grafiti.

Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek.* Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pria yang Janjikan Rp 1 Miliar Untuk Bunuh Ahok Akhirnya Dipolisikan. (2016, 11 7). Diambil dari JawaPos.com.(Diakses 12 Desember 2017)

Sari, Nursita;. (16 April 2014). *Elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Menurut Survei 5 Lembaga.* Diambil dari Kompas.com.(Diakses 20 Desember 2017)

Toyudho, Eko Siswono. (7 Oktober 2016). *Middlemen and the Jakarta Bay Reclamation Scandal.* Diambil en.tempo.co.(Diakses 12 Januari 2018)

Yulawati. (25 Mei 2017). *Video Viral Media Sosial, Anak-anak Berteriak Bunuh si Ahok.* Diambil dari CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com. (Diakses 12 Januari 2018)